



**Kementerian PPN/
Bappenas**

e-Newspaper Media Online

Ekonomi

Kamis, 15 November 2018



**Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
Jakarta, Bappenas
2018**

Daftar Isi

1. IMPOR TERUS DIKENDALIKAN (*Media Online Kompas*)
2. MENARIK MINAT INVESTOR (*Media Online Kompas*)
3. KEBIJAKAN INSENTIF FISKAL YANG MENDORONG PEREKONOMIAN (*Media Online Media Indonesia*)
4. INDUSTRI KELAUTAN MESTI DIBENAHAI (*Media Online Media Indonesia*)
5. PETANI DAN NELAYAN INDONESIA MASUK KATEGORI (*Media Online Republika*)

KOMPAS

kamis

AMANAT HATI NURANI RAKYAT

15 November 2018

Impor Terus Dikendalikan

Penurunan harga minyak mentah dinilai bakal menekan defisit neraca perdagangan. Impor barang konsumsi menjadi perhatian meski stok sejumlah komoditas dinilai cukup bahkan surplus.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah berupaya mengendalikan impor untuk menekan defisit neraca perdagangan pada akhir tahun. Penurunan harga minyak mentah dunia diperkirakan membantu menekan defisit di sektor minyak dan gas bumi.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan (Kemendag) Karyanto Suprih, kepada *Kompas*, Rabu (14/11/2018), mengatakan, pengendalian impor terus dilakukan Kementerian Perdagangan untuk menekan defisit. Fokusnya lebih pada barang-barang konsumsi, bukan bahan baku atau penolong yang dibutuhkan industri pengolahan.

"Pengaturan jadwal realisasi impor juga dilakukan melalui koordinasi dengan importir dan mengatur pengeluaran izin impor. Hal itu bertujuan agar impor tidak menumpuk pada bulan-bulan tertentu," katanya.

Terkait impor bahan pangan strategis, seperti gula mentah, daging sapi, sapi, daging kerbau, jagung, beras, dan garam, Kemendag mencatat masih ada sisa alokasi yang masih bisa direalisasikan hingga akhir 2018. Berdasarkan data Kemendag, alokasi

Prognosis Produksi dan Kebutuhan Nasional Komoditas Pangan Strategis Periode November-Desember 2018 (Ribu Ton)



impor gula mentah 1,022 juta ton dengan realisasi 877.260 ton (87,78 persen). Sementara alokasi impor garam industri 3,1 juta ton dan terealisasi 2,17 juta ton. Masa berlaku surat persetujuan impor (SPI) keduanya hingga 31 Desember 2018.

Adapun alokasi impor daging segar 624.711 juta ton (realisasinya 499.638 ton) dengan masa berlaku SPI sampai 31 Desember 2018 dan Januari-Maret 2019. Alokasi impor beras 2 juta ton dan realisasinya 1,81 juta ton (90,57 persen), tetapi masa berlaku SPI berakhir 31 Oktober

2018.

Karyanto mengatakan, khusus impor jagung, belum ada SPI. Sebab, Perum Bulog belum mengajukan permohonan. Ada kemungkinan Bulog masih menunggu penugasan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara.

Dinilai cukup

Terkait pemenuhan kebutuhan pangan akhir tahun, Kementerian Pertanian mengklaim produksi dalam negeri cukup. Berdasarkan data Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian, Rabu (14/11/2018), peng-

adaan beras dari dalam negeri pada November-Desember 2018 surplus 404.000 ton. Sementara daging ayam surplus 122.000 ton dan telur ayam surplus 226.000 ton pada kurun waktu yang sama.

Saat meninjau Pasar Kramatjati dan Pasar Induk Beras Cipinang, pekan lalu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, harga pangan pada akhir tahun nanti seharusnya stabil berdasarkan pengalaman pada Ramadhan dan Lebaran 2018. Kestabilan harga tersebut menunjukkan stok pangan yang

cukup.

Migas

Head of Industry and Regional Research Department Office of Chief Economist PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Dendi Ramdani mengemukakan, impor pada triwulan IV-2018 diperkirakan turun karena harga minyak mentah dunia turun. Impor migas merupakan penyebab defisit neraca perdagangan terbesar dengan porsi 15,89 persen pada triwulan I-III tahun ini.

Pada September 2018, impor migas sebesar 2,3 miliar dollar AS. Angka itu turun 25,2 persen dari 3 miliar dollar AS pada Agustus 2018. "Jika harga minyak mentah dunia turun, nilai impor migas juga akan ikut turun. Penurunan impor migas itu akan menjadi sumber utama penurunan impor akhir tahun ini," ujarnya.

Adapun untuk barang modal dan bahan baku, lanjut Dendi, kalau dilihat tren tahun sebelumnya, agak menurun pada akhir tahun. Mungkin kebutuhan barang modal dan bahan baku sudah dipenuhi pada pertengahan tahun. (HEN/JUD)

Pemerintah terus berupaya mengendalikan impor untuk menekan defisit neraca perdagangan hingga akhir tahun. Sementara penurunan harga minyak mentah dunia diperkirakan akan membantu menurunkan defisit neraca perdagangan dari sektor minyak dan gas bumi. Kemudian Penurunan harga minyak mentah dinilai bakal menekan defisit neraca perdagangan. Impor barang konsumsi jadi perhatian meski stok sejumlah komoditas dinilai cukup bahkan surplus

Hashtag Berita :

#EksportImport #NeracaPerdagangan #MoneterKeuanganNegara #DefisitKeuangan
#PelaksanaanProgramNasional #StabilitasEkonomiIndonesia #APBN #DuniaIndustri
#KementerianPerdagangan #KesejahteraanMasyarakat #PertumbuhanEkonomiNasional

Menarik Minat Investor

Jawa ibarat magnet yang masih kuat untuk menarik investor dalam negeri dan luar negeri untuk menanamkan modal di sektor riil. Data Badan Koordinasi dan Penanaman Modal menunjukkan, lokasi yang disasar investor pada periode Januari-September 2018 ada di Jawa.

Total realisasi investasi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing pada Januari-September 2018 sebesar Rp 535,4 triliun. Realisasi investasi terbesar ada di Jawa Barat, yakni Rp 88,4 triliun atau 16,5 persen dari total realisasi.

Di sisi lain, sejak beberapa tahun lalu, pemerintah berupaya mempercepat penyebaran industri ke luar Jawa. Hal ini merupakan langkah mengurangi kesenjangan Jawa-luar Jawa.

Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) memetakan sejumlah faktor yang membuat Jawa masih diminati investor. Investasi cenderung mendekati pasar. Di titik ini, Jawa merupakan pusat sebaran penduduk di Indonesia dengan tingkat kemampuan daya beli yang relatif lebih tinggi. Ketersediaan tenaga kerja yang lebih terampil dan siap kerja serta kemudahan akses terkait kebutuhan investasi juga ada di Jawa. Investor tentu mempertimbangkan hal tersebut dalam keputusan investasi mereka.

Namun, selain mengincar pasar, investor mendambakan posisi yang dekat dengan sumber bahan baku. Maka, daerah di luar Jawa memiliki potensi aneka sumber daya untuk menarik investasi.

Pemberian daya tarik berupa kemudahan atau insentif-fiskal dan nonfiskal—yang lebih baik akan mendukung penyebaran investasi ke luar Jawa. Peningkatan infrastruktur dan utilitas yang akan mengefisienkan perusahaan dalam beroperasi juga menjadi daya tarik tersendiri.

Percepatan penyebaran pembangunan industri diperkuat Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035. RIPIN menetapkan sasaran perwilayahan industri, antara lain, peningkatan persentase kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas luar Jawa dibandingkan dengan Jawa, dari 28 : 72 pada 2013 menjadi 40 : 60 pada 2035.

Kontribusi investasi sektor industri pengolahan nonmigas di luar Jawa terhadap total investasi sektor industri pengolahan nonmigas nasional diharapkan meningkat. Penumbuhan 36 kawasan industri yang memerlukan lahan sekitar 50.000 hektar diprioritaskan di luar Jawa hingga 2035.

Kementerian Perindustrian menyatakan terus berupaya agar kawasan industri lebih menarik untuk investasi sektor industri. Salah satunya berupa pemberian insentif fiskal perpajakan yang lebih besar pada daerah-daerah potensial, seperti Papua, Papua Barat, Sulawesi, dan Kalimantan.

Sejauh ini, eksekusi implementasi kebijakan proinvestasi yang dinilai masih kurang ditengarai berdampak pada realisasi penanaman modal di Indonesia.

Ada banyak pekerjaan rumah yang masih harus dituntaskan untuk meningkatkan dan pemeratakan pembangunan ekonomi—termasuk melalui investasi—ke seluruh penjuru negeri.

(C ANTO SAPTOWALYONO)

MENARIK MINAT INVESTOR

Total realisasi investasi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing pada Januari–September 2018 sebesar Rp 535,4 triliun. Di sisi lain, sejak beberapa tahun lalu, pemerintah berupaya mempercepat penyebaran industri ke luar Jawa. Hal ini merupakan langkah mengurangi kesenjangan Jawa-luar Jawa. Kemudian Percepatan penyebaran pembangunan industri diperkuat Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 dan Kementerian Perindustrian menyatakan terus berupaya agar kawasan industri lebih menarik untuk investasi sektor industri. Salah satunya berupa pemberian insentif fiskal perpajakan yang lebih besar pada daerah-daerah potensial seperti Papua, Papua Barat, Sulawesi, dan Kalimantan. Sejauh ini, eksekusi implementasi kebijakan proinvestasi yang dinilai masih kurang ditengarai berdampak pada realisasi penanaman modal di Indonesia.

Hashtag Berita :

#EksportImport #KesejahteraanMasyarakat
 #PMA #PMDN #MoneterKeuanganNegara
 #PertumbuhanEkonomiNasional #APBN
 #StabilitasEkonomiIndonesia #DuniaIndustri
 #KementerianPerdagangan #NeracaPerdagangan
 #KementerianPerindustrian #DevisaNegara
 #PelaksanaanProgramNasional



Kebijakan Insentif Fiskal yang Mendorong Perekonomian

Herry Setyawan

Bekas Kepala Komite Pengawas Perpajakan Kementerian Keuangan RI

PEMERINTAH berencana menggulirkan lagi stimulus ekonomi berupa kebijakan insentif fiskal yang tujuannya menarik investasi langsung. Beberapa insentif yang sedang dirumuskan antara lain penghapusan atas Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) di sektor properti.

Di sektor keuangan juga sedang dikaji untuk instrumen insentif perpajakan berupa penyesuaian tarif PPh untuk bunga obligasi, dana investasi real estat (DIRE), dan investasi infrastruktur (Dimfra), dan reksadana penyertaan terbatas (RDPT). Tentunya perlu diteliti apakah kebijakan itu memang mendesak, diperlukan, dan dibutuhkan para pemangku kepentingan.

Bertambahnya berbagai insentif fiskal itu secara langsung akan meningkatkan besaran *tax expenditure* (belanja pajak). Namun, apabila kebijakan itu tepat sasaran, tentu akan mendorong pergerakan dan tumbuhnya perekonomian.

Belanja pajak adalah penerimaan perpajakan yang tidak terhimpun atau berkurang sebagai akibat adanya ketentuan khusus yang berbeda dari sistem perpajakan secara umum, yang menysar hanya sebagian

subjek dan objek pajak dengan persyaratan tertentu.

Adapun tujuan penghitungan belanja pajak antara lain untuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Pihak pemerintah ataupun dunia usaha akan mendapatkan manfaatnya. Dari sisi pemerintah, menjadi instrumen pengawasan/monitoring dan evaluasi dalam mengelola keuangan negara, apakah kebijakan fiskal terutama yang menyumbang insentif perpajakan telah berjalan efektif, efisien, dan bermanfaat.

Pada akhir Agustus 2018, pemerintah telah menerbitkan laporan estimasi belanja pajak untuk 2016 dan 2017. Besarnya belanja pajak di 2016 sebesar Rp1436 triliun dan pada 2017 sebesar Rp1547 triliun. Dari sisi penerimaan, selama 2 tahun terdapat kehilangan potensi pajak sebagai imbas dari pelaksanaan kebijakan insentif fiskal sebesar Rp298,3 triliun.

Jika dihitung berdasarkan rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB), kehilangan penerimaan tercatat masing-masing 1,16% di 2016 dan 1,14% pada 2017. Namun, apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan, belanja pajak berpengaruh cukup signifikan yaitu 13,26% dari realisasi pene-

rimaan 2016 (Rp1.105 triliun) dan 13,70% dari realisasi 2017 (Rp1.339,80 triliun).

Di saat rasio pajak semakin turun (2017 turun menjadi 10,78%, hasil audit BPK RI) dan target penerimaan pajak tidak pernah tercapai sejak 2008, tentunya menjadi perhatian pemerintah untuk benar-benar melakukan *monitoring* dan evaluasi atas kebijakan insentif pajak yang merupakan komponen utama dari belanja pajak.

Apabila belanja pajak 2017 kita bedah lebih dalam, diketahui bahwa kontribusi belanja pajak di 2017 berasal dari empat pos pajak, yakni Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Rp239,54 triliun, Lalu, Pajak Penghasilan (PPH) Rp40,7 triliun, serta bea masuk dan cukai Rp17,99 triliun.

Dari sisi sektor kegiatan usaha, terbesar antara lain jasa keuangan 17,63%, pertanian dan perikanan 14,20%, manufaktur 12,30%, dan jasa transportasi 12,80%. Dari data ini diketahui, proporsi PPN dalam struktur belanja pajak berkisar 80%-81% dari total belanja pajak dan sektor-sektor yang mendapatkan porsi belanja pajak yang lebih besar justru menunjukkan kinerja yang masih di bawah ekspektasi misalnya sektor manufaktur. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan insentif fiskal belum bekerja sesuai

yang diharapkan.

Belanja pajak dari PPN seharusnya juga dapat digunakan untuk mendorong konsumsi dan menjaga daya beli rumah tangga/masyarakat serta berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Kenyataannya selama beberapa waktu belakangan konsumsi rumah tangga justru bergerak stagnan pada kisaran 5%.

Pada 2017, konsumsi rumah tangga malah berada di angka 4,95% atau merupakan titik paling rendah selama 5 tahun belakangan. Di samping itu, kontribusi konsumsi rumah tangga ke PDB juga menurun yakni dari 56,50% pada 2016 menjadi 56,13%.

Belanja pajak seharusnya didominasi oleh PPh, selain lebih netral, belanja pajak dalam bentuk PPh bisa lebih mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan karena dimanfaatkan sektor-sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap PDB. Data belanja pajak mencatat porsi belanja PPh pada 2016 tercatat hanya 14,3% dan pada 2017 justru turun pada angka 13,04%.

Hal ini juga terkonfirmasi dari rendahnya belanja pajak yang dimaksudkan untuk kepentingan investasi dan mendorong perekonomian. Terlebih data terakhir yang dikeluarkan Bank Dunia menunjukkan peringkat *Ease of Doing Business (EoDB)* Indonesia di 2018 turun satu peringkat menjadi 73 (2017 peringkat 72).

Pemerintah sebenarnya telah berusaha untuk lebih probisitas dan transparan serta melakukan *re-branding* dengan menumbuhkan daya tarik investasi bersaing dengan negara tetangga khususnya Thailand, Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Na-

mun, dari beberapa catatan terkait kebijakan insentif fiskal yang telah dikeluarkan, ada yang telah dan belum tepat sasaran dan menjadi daya tarik investasi.

Dalam implementasinya, hal-hal yang terkait teknis operasional, perizinan, SDM, dan sarana infrastruktur masih menjadi kendala dan belum sesuai yang dijanjikan. Misalnya kebijakan pembentukan 12 kawasan ekonomi khusus (KEK) yang mendapatkan fasilitas dan kemudahan fiskal berupa pembebasan PPh, PPN, dan bea masuk. Sampai saat ini masih banyak yang belum operasional.

Penulis pernah melakukan survei di salah satu KEK yaitu KEK Sei Mankei, sejak dibuka pada 2012, baru satu investor yang tertarik berinvestasi yaitu Grup Unilever, yang telah menginvestasikan lebih dari Rp2 triliun. Namun, dukungan regulator dalam penyediaan fasilitas baik fiskal maupun operasional belum optimal.

Fasilitas fiskal *tax holiday* yang diperoleh tidak sesuai yang dijanjikan (100% bebas dan dalam jangka waktu lebih dari 10 tahun). Sarana infrastruktur penunjang terutama Pelabuhan Kuala Tanjung juga belum operasional.

Kebijakan yang telah mendapat respons dan ketertarikan investor ialah kebijakan *tax holiday*, yang telah direvisi sangat revolusioner. Data terakhir, kebijakan *tax holiday* yang telah direvisi dengan Peraturan Menteri Keuangan No35/2018, sejak diterbitkan bulan April, telah ada 8 investor yang tertarik menggunakan, dengan nilai investasi Rp16,3 triliun dalam bidang usaha manufaktur yakni industri kelistrikan dan industri logam. Investasi itu diperkirakan akan dapat

menyerap 7.911 tenaga kerja.

Kebijakan insentif fiskal sebagai komponen utama dalam belanja pajak harus benar-benar melalui proses selektif, terukur, terstruktur, melalui kajian yang mendalam dan komprehensif. Juga menjamin terciptanya *services level playing field* di dunia usaha. Jangan sampai malah mencederai kondisi sekarang yang telah kondusif dengan dunia usaha. Investasi ialah untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa melalui aktivitas ekonomi yang mempunyai efek pengganda dan akan berujung pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Dari berbagai catatan di atas, diketahui, sebagian belanja pajak berupa kebijakan insentif pajak belum signifikan mendorong konsumsi dan daya beli rumah tangga/masyarakat, mendorong investasi, dan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Bahkan berpotensi menjadi *negative tax* baik dari aspek pengumpulan maupun pengurangan pajak.

Ke depan diharapkan, dengan adanya laporan belanja pajak, ukuran efektivitas dan efisiensi kebijakan insentif pajak lebih presisi. Juga terserius sesuai kebutuhan, tepat sasaran, berhadis dan berdaya guna.

Dalam era transparansi ekonomi dan demokrasi yang sudah kondusif ini, seyogyanya para pengambil kebijakan negeri ini dapat mengularkan kebijakan yang memang seharusnya berlaku (*ius constitutum*), bukan sebaliknya berlaku (*ius constituentum*), agar murah keadilan dan kemendapatannya dirasakan seluruh rakyat Indonesia.

Tulisan ini merupakan pendapat pribadi

Pemerintah berencana menggulirkan lagi stimulus ekonomi berupa kebijakan insentif fiskal yang tujuannya menarik investasi langsung. Beberapa insentif yang sedang dirumuskan antara lain penghapusan atas Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) di sektor properti. Di sektor keuangan juga sedang dikaji untuk instrumen insentif perpajakan dan perlu mendalami apakah kebijakan itu memang mendesak, diperlukan, dan dibutuhkan para pemangku kepentingan. Bertambahnya berbagai insentif fiskal itu secara langsung akan meningkatkan besaran *tax expenditure* (belanja pajak). Namun, apabila kebijakan itu tepat sasaran, tentu akan mendorong pergerakan dan tumbuhnya perekonomian. Belanja pajak adalah penerimaan perpajakan yang tidak terhimpun atau berkurang sebagai akibat adanya ketentuan khusus yang berbeda dari sistem perpajakan secara umum, yang menysar hanya sebagian subjek dan objek pajak dengan persyaratan tertentu.

Hashtag Berita :

#KesejahteraanMasyarakat #PMA #PMDN #KebijakanFiskal #MoneterKeuanganNegara #PertumbuhanEkonomiNasional #APBN #StabilitasEkonomiIndonesia #DuniaIndustri #NeracaPerdagangan #Perpajakan #DevisaNegara #PelaksanaanProgramNasional

Industri Kelautan Mesti Dibenahi

Penggunaan kapal asing dalam kegiatan ekspor-impor berkontribusi menggerus devisa.

ANDHIKA PRASETYO
Andhika@mediaindonesia.com

MENTERI Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, untuk menambal defisit transaksi berjalan, salah satu upaya yang dilakukan ialah dengan menggenjot ekspor, termasuk dari sektor kelautan.

"Di neraca perdagangan, migas memang bikin defisit, tapi kalau kita bisa ekspor (nonmigas, termasuk kelautan) lebih banyak lagi, defisitnya bisa tertutup," ujar Bambang dalam diskusi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Bappenas dalam rangka penyusunan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 di Kantor Bappenas, Jakarta, kemarin.

Bambang mencontohkan Thailand yang neraca transaksi berjalan surplus kendati mereka bukan merupakan negara penghasil minyak.

"Impor minyak yang besar itu mereka tutupi dengan ekspor lebih besar lagi. Salah satu yang jadi kekuatan Thailand itu ialah industri pengolahan makanan dan minumannya," kata Bambang.

Menilik industri pengolahan makanan dan minuman di Tanah Air, kata Bambang, sektor tersebut sebagai salah satu sektor andalan karena dari aspek penciptaan nilai tambah, penciptaan lapangan kerja, dan juga ekspornya paling besar.

"Tapi industri ini tidak bisa menciptakan nilai tambah kalau tidak ada *input*-nya, yakni dari kelautan dan perikanan. Katakanlah olahan makanan laut yang simpel seperti

*fillet ikan atau udang sampai yang kalengan. Harusnya itu yang bisa jadi dominasi Indonesia. Maksud saya jangan sampai kita punya *input*-nya, tapi ketika sudah ada nilai tambahnya dikuasai asing,"* ujar Bambang.

Kapal asing

Dia juga menyoroti penggunaan kapal asing dalam angkutan kargo yang menjadi salah satu penyumbang defisit transaksi berjalan terbesar dari sektor jasa. Para pelaku ekspor dan impor nasional, kata dia, masih belum banyak menggunakan jasa pelayaran lokal dalam penyelenggaraan perdagangan luar negeri mereka.

Hal itulah, menurut Bambang, yang berkontribusi menggerus devisa negara. "Jadi kita ekspor barang, kita dapat devisa, tetapi kita pakai kapal asing, devisa keluar juga untuk bayar sewa itu," ujarnya.

Menurut dia, titik persoalan utama berada pada sedikitnya jumlah kapal besar lokal yang memiliki jalur pelayaran langsung ke luar negeri.

"Kapal besar ini belum banyak dimiliki perusahaan-perusahaan Indonesia. Jadi kita bergantung kepada kapal-kapal asing yang memang sudah lama sekali menguasai bidang itu," tutur Bambang.

Direktur Komersial Pengembangan Bisnis Pelindo II Saptono Irianto mengakui bahwa kapal besar asing memang masih mendominasi pengiriman barang dari Indonesia ke luar negeri ataupun sebaliknya.

Kendati demikian, menurut dia, sekarang sudah banyak kapal kecil dan menengah yang dimanfaatkan dan memiliki jalur perdagangan global.

"Penggunaan kapal besar atau kecil itu bergantung pada apa dan berapa besar yang dikirim. Penguasaan juga melihat ke mana jurusannya. Kalau yang dikirim tidak banyak, masak pakai yang besar. Kalau melalui alur pendek, juga tidak bisa pakai kapal besar, nanti kandas dia," jelasnya. (E-2)

INDUSTRI KELAUTAN MESTI DIBENAH

Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas mengatakan, untuk menambal defisit transaksi berjalan, salah satu upaya yang dilakukan ialah dengan menggenjot ekspor, termasuk dari sektor kelautan. Di neraca perdagangan, migas memang bikin defisit, tapi kalau kita bisa ekspor (nonmigas, termasuk kelautan) lebih banyak lagi, defisitnya bisa tertutup. Kemudian Bappenas dalam rangka penyusunan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 - 2024 mencontohkan Thailand yang neraca transaksi berjalan surplus kendati mereka bukan merupakan negara penghasil minyak. Impor minyak yang besar itu mereka tutupi dengan ekspor lebih besar lagi.

Hashtag Berita :

#KementerianPPN/Bappenas #PMDN
#EksportImport #NeracaPerdagangan
#StabilitasEkonomiIndonesia #PMA
#PertumbuhanEkonomiNasional #APBN
#DuniaIndustri #KebijakanFiskal
#MoneterKeuanganNegara #DevisaNegara
#PelaksanaanProgramNasional

REPUBLIKA

KAMIS, 15 NOVEMBER 2018

Petani dan Nelayan Indonesia Masuk Kategori Miskin

● ADINDA PRYANKA

JAKARTA — Di usia kemerdekaan yang ke-73 tahun, perekonomian Indonesia belum menunjukkan perbaikan yang signifikan. Contohnya, sebagai negara yang subur akan sumber daya alam, baik di darat maupun laut, petani dan nelayan yang merupakan pelaku usaha di bidang ini masih terbelenggu kemiskinan.

Hal tersebut disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. Dia mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kelompok masyarakat miskin hingga saat ini masih ditempati oleh petani dan nelayan. "Kok di tempat yang kita paling kaya secara alami, secara natural, pelakunya adalah orang miskin, orang yang tergolong kategori paling miskin di Indonesia," ujarnya dalam diskusi Sumbang Pemikiran Kadin dalam RPJMN 2020-2024, Rabu (14/11).

Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan Indonesia terus menurun. Pada September 2017, persentase kemiskinan tercatat sebesar 10,12 persen atau setara dengan 26,58 juta orang penduduk miskin di Indonesia. Kemudian,

per Maret 2018, angka kemiskinan turun ke level satu digit, 9,82 persen atau setara dengan 25,92 juta penduduk miskin. Namun, penurunan angka kemiskinan ini disebut tidak berpengaruh pada disparitas kemiskinan di perkotaan dan perdesaan yang masih tinggi.

Melalui pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ini, Bambang berharap semua pemangku kebijakan, termasuk pelaku industri, dapat menuntun para petani dan nelayan mendorong produk yang dihasilkan dapat diolah menjadi barang lebih bernilai, misalnya masuk pada industri makanan dan minuman.

Ketika sebuah produk dapat memberikan nilai tambah, produk tersebut dapat menjadi barang yang dijual di luar negeri. Dampak akhirnya, kesejahteraan petani dan nelayan dapat ikut terangkat.

Dalam RPJMN ini, Bambang sangat berharap industri kelautan dan perikanan dapat menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Tidak hanya sekadar berbicara mengenai produktivitas semata, ia juga berharap isu sosial masuk dalam pengembangan ini. "Utamany penciptaan lapangan kerja dan upaya penanggulangan kemiskinan," ujar Bambang.

Di sektor pertanian, mantan menteri keuangan ini menilai belum ada upaya serius untuk memperbaiki hasil produksi menjadi barang yang memiliki nilai jual tinggi. Misalnya, lanjut Bambang, salah satu sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan adalah kelapa.

Ia mengungkapkan, kini tengah berkembang olahan air kelapa di luar negeri yang berasal dari Filipina. Padahal, Indonesia mempunyai potensi besar dari segi jumlah tanaman kelapa di pesisir pantai. Persoalan seperti ini yang seharusnya dapat dipecahkan semua pemangku kepentingan.

Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto mengatakan, untuk memperbaiki tingkat kemiskinan di sektor kelautan, khususnya para nelayan, pemerintah mesti meningkatkan keahlian mereka. Pemberian kemudahan bagi para investor untuk melakukan bisnis di sektor kelautan juga harus diperhatikan karena bisnis yang dibangun dapat berdampak pada kesejahteraan nelayan.

"Memang regulasi yang dibuat harus menitikberatkan pada aspek peningkatan kesejahteraan nelayan," ujar Yugi.



MENJEMUR KERUPUK Pekerja menjemur kerupuk di sentra industri kerupuk, Kenanga, Indramayu, Jawa Barat, Rabu (14/11). Pengusaha mengaku produksi kerupuk terkendala kondisi cuaca yang berubah-ubah sehingga menghambat proses pengeringan.

Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, mengatakan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kelompok masyarakat miskin hingga saat ini masih ditempati oleh petani dan nelayan. "Kokdi tempat yang kita paling kaya secara alami, secara natural, pelakunya adalah orang miskin, orang yang tergolong kategori paling miskin di Indonesia. Kemudian dalam pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ini, berharap semua pemangku kebijakan, termasuk pelaku industri, dapat menuntun para petani dan nelayan mendorong produk yang dihasilkan dapat diolah menjadi barang lebih bernilai

Hashtag Berita :

#KementerianPPN/Bappenas #KesejahteraanMasyarakat #RPJMN #ProgramKemiskinan #PMDN #EksportImport #NeracaPerdagangan #StabilitasEkonomiIndonesia #PMA #PertumbuhanEkonomiNasional #APBN #DuniaIndustri #KebijakanFiskal #MoneterKeuanganNegara #DevisaNegara #PelaksanaanProgramNasional